

**KESIAPAN SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM
MAKAN BERGIZI GRATIS**
*SCHOOL READINESS IN IMPLEMENTING THE FREE NUTRITIOUS
MEAL PROGRAM*

Fifi Ariani

Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja LAN RI

Revita Rahim

Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja LAN RI

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan status gizi anak sekolah dan mengurangi kesenjangan sosial. Namun, implementasinya menghadapi tantangan signifikan terkait kapasitas sekolah, kesiapan guru, kualitas dapur penyedia, dan ketimpangan antar wilayah. Guru seringkali menanggung beban tambahan tanpa dukungan insentif, sementara dapur di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) menghadapi keterbatasan infrastruktur dan logistik. Pendekatan kebijakan yang menekankan *equality* tanpa mempertimbangkan *equity* berpotensi memperlebar ketimpangan. Diperlukan strategi berbasis keadilan dengan memperhatikan kebutuhan lokal, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan sistem pengawasan mutu agar program ini efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: makan bergizi gratis, kesiapan sekolah, equity, equality, kebijakan publik

ABSTRACT

The Free Nutritious Meal (MBG) program is a strategic government initiative to improve students' nutritional status and reduce social disparities. However, its implementation faces major challenges related to school capacity, teacher workload, kitchen quality, and regional disparities. Teachers often bear additional responsibilities without adequate incentives, while kitchens in remote areas suffer from infrastructure and logistics limitations. A policy approach that prioritizes equality over equity risks widening existing gaps. Therefore, an equity-based strategy is required, emphasizing local needs, human resource development, and stronger quality assurance systems to ensure effectiveness and sustainability.

Keywords: free nutritious meals, school readiness, equity, equality, public policy

A. Pendahuluan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas nasional sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat sumber daya manusia Indonesia melalui peningkatan gizi anak sekolah. Program ini memiliki skala yang sangat besar dengan alokasi anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp 71 triliun, dengan realisasi hingga 3 Oktober 2025 sebesar Rp 20,6 triliun (29% dari total pagu). Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan bahan pangan bergizi, distribusi makanan, pelatihan, serta pengawasan mutu. Program ini menargetkan 31,2 juta penerima manfaat dimana sebagian besar peserta didik di sekolah dasar dan menengah.

Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah diberikan amanat melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2024, memiliki tugas utama melaksanakan pemenuhan gizi masyarakat secara menyeluruh, yang mencakup penyusunan kebijakan, pengawasan pelaksanaan, keseragaman standar mutu, hingga memastikan ketersediaan pangan bergizi untuk seluruh lapisan masyarakat. Lembaga ini diharapkan mampu mengatasi fragmentasi dan inkonsistensi kebijakan antarwilayah, sekaligus memperkuat tata kelola program berskala nasional. Meskipun demikian, pendekatan yang sangat tersentralisasi juga membawa sejumlah risiko. Terlalu kuatnya kendali pusat dapat membatasi ruang inisiatif lokal, mengurangi peluang pelibatan UMKM dan petani kecil, serta menurunkan responsivitas terhadap kebutuhan spesifik sekolah dan daerah. Dalam skema seperti ini, potensi kesenjangan antara desain kebijakan di tingkat pusat dan realitas lapangan menjadi semakin besar.

Di sisi lain, keberhasilan program MBG sejatinya tidak hanya bergantung pada tata kelola pusat, melainkan pada kapasitas sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan. Sekolah menjadi titik kontak langsung

dengan peserta didik: tempat menu bergizi disajikan, distribusi dilakukan, serta pemantauan manfaat gizi dan kesehatan berlangsung setiap hari. Oleh karena itu, peninjauan terhadap kesiapan sekolah menjadi krusial. Program harus mampu menjembatani standar nasional dengan fleksibilitas pelaksanaan di lapangan. Dalam konteks ini, penting untuk menemukan keseimbangan antara pemerataan (*equality*), memastikan seluruh anak memperoleh hak yang sama atas gizi berkualitas, dan keadilan (*equity*), memberikan dukungan lebih bagi daerah dan sekolah yang menghadapi tantangan struktural lebih berat.

B. Deskripsi Permasalahan

Efektivitas program makan bergizi gratis (MBG) sangat bergantung pada pemenuhan lima aspek utama yaitu penggunaan sumber pangan lokal, pelibatan UMKM lokal sebagai penyedia jasa makanan, penyerapan tenaga kerja lokal dalam distribusi, penargetan penerima manfaat yang membutuhkan peningkatan gizi, dan fokus pada sekolah-sekolah di daerah prioritas peningkatan gizi anak. Pemenuhan aspek-aspek ini diyakini akan memaksimalkan efek pengganda ekonomi dari program tersebut (UNICEF, 2024).

Untuk mewujudkan hal itu, pelaksanaan MBG bergantung pada kesiapan tiga aktor utama: sekolah, dapur penyedia, dan pemerintah daerah. Di antara ketiganya, sekolah memegang peran paling krusial sebagai pelaksana langsung di lapangan. Namun, banyak sekolah menghadapi tantangan serius dalam kapasitas pelaksanaan, khususnya dari sisi sumber daya manusia. Guru dan tenaga pendidik kerap harus menanggung beban kerja tambahan, seperti mengatur waktu makan, mendampingi siswa, mengawasi distribusi, serta menangani keluhan atau hambatan teknis. Beban ini sering kali tidak diimbangi dengan dukungan insentif

maupun pelatihan teknis yang memadai terkait gizi, keamanan pangan, dan manajemen logistik. Kondisi tersebut terutama dirasakan oleh sekolah-sekolah dengan sumber daya terbatas, termasuk di daerah terpencil atau wilayah prioritas stunting, sehingga berpotensi menurunkan efektivitas dan keberlanjutan program.

Dari sisi penyedia makanan, banyak dapur sekolah belum memenuhi standar kelayakan dan menghadapi keterbatasan dalam pengadaan bahan pangan, peralatan, dan fasilitas pengolahan. Kondisi geografis dan infrastruktur juga memengaruhi rantai pasok makanan bergizi. Akibatnya, kesiapan antarwilayah menjadi timpang, sekolah-sekolah di perkotaan relatif lebih siap dibandingkan dengan di pedesaan dan daerah 3T. Untuk mengatasi variasi dan disparitas tersebut, pemerintah memutuskan untuk memusatkan pelaksanaan MBG melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Model ini menggantikan sistem sebelumnya yang melibatkan banyak aktor, seperti OPD, yayasan, NGO, UMKM, dan perusahaan swasta melalui skema CSR. Pendekatan baru tersebut diharapkan memperkuat akuntabilitas, efisiensi rantai pasok, dan keseragaman standar mutu nasional. Dengan dana mencapai Rp. 71 triliun, sentralisasi dinilai mampu mengurangi fragmentasi kebijakan dan mempertegas mandat hukum program.

Namun, di balik potensi keunggulannya, pendekatan yang terlalu terpusat juga membawa risiko over-sentralisasi. Sentralisasi yang kaku dapat melemahkan fleksibilitas kebijakan dan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Model seragam berisiko menghasilkan menu dan mekanisme distribusi yang tidak sesuai dengan preferensi lokal, kearifan budaya makan, dan kebiasaan masyarakat setempat (*one-size-fits-all*). Selain itu, pola pengadaan yang tersentralisasi berpotensi menciptakan struktur pasar yang oligopolistik, menguntungkan pemain besar dan menyingkirkan UMKM serta

petani lokal dari rantai pasok. Di sisi lain, mekanisme respons terhadap kasus khusus seperti alergi dan insiden keamanan pangan menjadi lebih lambat karena tidak adanya sistem pemetaan risiko di tingkat sekolah atau daerah.

Jalur umpan balik dari siswa, guru, dan masyarakat juga berpotensi menjadi lebih panjang dan birokratis. Ketika umpan balik tidak cepat ditangani, maka peluang perbaikan berbasis bukti di tingkat lokal akan semakin kecil. Dengan demikian, efektivitas kebijakan MBG tidak hanya ditentukan oleh efisiensi administratif, tetapi juga oleh kemampuan negara menjaga konektivitas dengan realitas lokal serta memberikan ruang partisipasi bagi komunitas sekolah dan masyarakat.

Agar pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis berjalan dengan baik, satuan pendidikan perlu melakukan persiapan dari aspek Sarana Prasarana, Pelaksanaan, Sumber Daya Manusia, dan Pembiayaan. Pada aspek Persiapan dilakukan melalui Sarana Prasarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), penentuan area penempatan/transit makanan, perangkat APD untuk dikenakan oleh petugas yang menerima makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan petugas yang mendistribusikan makanan, serta sarana prasarana pembuangan sampah. Aspek Persiapan Pelaksanaan sekolah melakukan Pendataan Jumlah Sasaran Penerima Manfaat MBG dan Kondisi khusus yang terdiri dari alergi, fobia dan intoleransi makanan. Aspek Persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan melalui Sosialisasi Program MBG bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan/warga sekolah dan sosialisasi Penyelenggaraan Program MBG bagi ekosistem satuan Pendidikan dan Edukasi Gizi dan PHBS kepada berbagai kelompok sasaran seperti Tenaga pendidik, peserta didik dan orangtua/wali.

Dari perspektif sosial, keadilan dalam MBG tidak berhenti pada pemerataan gizi semata, melainkan juga menyangkut pengakuan atas perbedaan budaya makan, ekosistem lokal, dan cara masyarakat merawat anak-anaknya. Kebijakan yang bersifat sangat *top-down* menjadikan aktor akar rumput, seperti guru, komite sekolah, UMKM, dan ibu rumah tangga, sebatas pelaksana administratif tanpa ruang menentukan cara terbaik untuk mengelola kebutuhan gizi anak-anak di lingkungan mereka. Akibatnya, mereka kehilangan otonomi substantif dalam menjalankan program.

Lebih jauh lagi, MBG berpotensi mereproduksi struktur kuasa pusat, di mana negara, melalui BGN, menjadi penentu tunggal standar konsumsi dan selera makan nasional. Standar tersebut sering kali mengabaikan keberagaman praktik sosial dan budaya makan masyarakat. Dalam konteks ini, negara tidak hanya “memberi makan,” tetapi juga secara simbolik mendisiplinkan tubuh anak-anak sesuai dengan definisi resmi tentang “anak sehat, pintar, dan produktif.” Dengan demikian, MBG tidak sekadar menjadi program gizi, tetapi juga alat produksi nilai dan norma sosial tentang kesehatan dan produktivitas versi negara, yang belum tentu selaras dengan nilai-nilai komunitas lokal.

Model internasional seperti Program PNAE (*Programa Nacional de Alimentação Escolar*), program makan di sekolah di Brasil yang dimulai sejak 1955, menunjukkan bahwa desentralisasi bukan berarti kehilangan kontrol, tetapi bisa menjadi cara untuk menumbuhkan pemberdayaan ekonomi lokal dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, kombinasi model terpusat untuk pengawasan mutu dengan ruang desentralisasi terbatas di tingkat daerah tampaknya menjadi pendekatan yang paling relevan. Dengan cara ini, MBG tidak hanya menjamin gizi anak sekolah, tetapi juga memperkuat keadilan sosial,

pemberdayaan komunitas, dan keberlanjutan ekonomi lokal.

C. Rekomendasi Kebijakan

1. Perkuat Kapasitas dan Kesiapan Sekolah serta Dapur Penyedia

Lakukan pemetaan menyeluruh terhadap kapasitas sekolah, dapur, dan kebutuhan lokal untuk menentukan prioritas intervensi kebijakan. Sertifikasi dapur, pelatihan bagi guru dan pengelola, serta peningkatan kompetensi gizi dan keamanan pangan perlu dipercepat agar pelaksanaan program berjalan aman dan efisien.

2. Terapkan Prinsip *Equity* dalam Pendanaan dan Distribusi Sumber Daya

Kebijakan MBG perlu mempertimbangkan kondisi geografis dan kapasitas daerah dengan menerapkan prinsip keadilan (*equity*), bukan keseragaman (*equality*). Pendanaan dan logistik harus disesuaikan dengan kebutuhan serta tantangan lokal agar tidak memperlebar kesenjangan antarwilayah.

3. Bangun Model Kemitraan Multi-Aktor dan Pemberdayaan Lokal

Dorong keterlibatan aktif sekolah, PKK, UMKM, dan petani lokal melalui kemitraan yang terkoordinasi dalam kerangka pengawasan nasional. Pendekatan hibrida yang menggabungkan pengawasan terpusat dengan ruang desentralisasi terbatas dapat memperkuat ekonomi lokal sekaligus menjaga mutu program.

4. Perkuat Tata Kelola, Transparansi, dan Akuntabilitas Publik

Tingkatkan mekanisme pengawasan, pelaporan berbasis bukti, dan

komunikasi publik yang transparan. Melibatkan masyarakat dan lembaga independen dalam proses evaluasi untuk memastikan dana besar MBG dikelola secara efektif, akuntabel, dan adaptif terhadap masukan publik.

Menengah. (2024). Pedoman Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pendidikan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Gizi Nasional (BGN). (2025). Rasionalisasi Kebijakan Sentralisasi Program Makan Bergizi Gratis.
- Chiara Falvo. (2024). *Sustainable public food procurement in Brazilian schools - An obligation under and beyond the National School Feeding Programme (Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE)*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). Pedoman Gizi Seimbang untuk Anak Usia Sekolah.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Panduan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan

Dokumen

- Dewan Perwakilan Rakyat RI. (2025). Laporan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis: Evaluasi Pelaksanaan Semester I 2025.
- LSM Gizi Anak Indonesia. (2025). Advokasi Publik atas Pelaksanaan Program MBG di Daerah 3T.
- UNICEF Indonesia. (2024). Nutrition and Learning: Ensuring Healthy Meals for Every Child.
- World Health Organization (WHO). (2022). School Meals and Nutrition: Global Guidelines.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 tentang Program Makan Bergizi Gratis.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional.